

Demokrasi Pancasila Mengembangkan Kesejahteraan Umum Menyeluruh

Sunarto NDARU MURSITO*

PENGANTAR

Sungguh merupakan keberuntungan bahwa kita hidup dalam masa peradaban yang menjunjung tinggi sistem kemasyarakatan dan kenegaraan demokrasi. Bahagiannya hidup dalam negara demokrasi pasti akan lebih terasa, jika kita bandingkan dengan rasa kehidupan masyarakat dalam negara kerajaan tirani, negara jajahan, atau dalam negara kediktaturan sewenang-wenang. Dalam bentuk-bentuk negara yang baru disebut ini para warga negara memang banyak menderita karena berbagai ulah kaum penguasa. Entah itu berupa pengkelasan warga masyarakat dengan diskriminasi hak-haknya, pemungutan pajak berlebihan, tindakan angkuh dan kejam para penguasa, dilalaikannya kesejahteraan rakyat banyak, dan penghisapan atau aneka penindasan lainnya.

Membicarakan masalah demokrasi berarti mengulas hidup kebersamaan manusia, pada khususnya menyadari makna kenyataan "masyarakat dan negara." Sudah merupakan dalil dasar bahwa pribadi-pribadi manusia hanya dapat berkembang menuju kesempurnaan dan kesejahteraannya melalui aktivitas yang saling melengkapi dengan manusia-manusia lainnya. Menurut alamiahnya tujuan hidup masing-masing pribadi baru dapat tercapai di dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan semakin besar dan kompleksnya masyarakat, maka kemajuan dan kesejahteraan yang sebaik mungkin bagi seluruh warganya membutuhkan organisasi masyarakat yang sempurna secara manusiawi berupa negara demokrasi.

Sistem demokrasi untuk kehidupan bermasyarakat dan bernegara ini pada hakikatnya mengalir dari dasar filsafati bahwa pribadi manusia adalah makhluk yang bebas dan sama derajat dengan manusia-manusia lainnya.

*Staf CSIS.

bahwa pemerintahan hanya memenuhi kepentingan pihak-pihak yang bisa bersuara dan beruntung dengan kekuasaannya. Ini terbukti ketika sesudah masa Pericles polis Athena yang berpemerintahan demokrasi kemudian sangat merosot dan dengan mudah ditaklukkan oleh polis Sparta yang diperintah secara ditaktor militer.

Menyadari kelemahan-kelemahan sistem demokrasi demikian itu, mudah dimengerti bila filsafat Plato (427-347 S.M.) melontarkan gagasannya tentang pemerintahan yang dipimpin oleh seorang *Filsuf Raja*. Orang yang paling mengetahui kebenaran dan bisa hidup dalam keseimbangan/bermoral luhur, yang menurut Plato ini hanya mungkin pada filsuf yang hebat, adalah satu-satunya pemimpin yang mampu membawa seluruh bangsa membangun masyarakat yang harmonis. Begitu pula filsafat Aristoteles (384-322 S.M.) menyarankan pemerintahan *monarki konstitusional*. Dalam hal ini raja sebagai pemerintah kuat yang memegang kekuasaan, namun kekuasaannya harus dijalankan sesuai dengan konstitusi yang mampu membangun negara menjadi ruang kebahagiaan bagi segenap warganya. Dan negara Republik Romawi pun akhirnya jatuh ke tangan Yulius Caesar (kaisar yang pertama) yang pada dasarnya melaksanakan pemerintahan *kediktatoran*.

Sudah pasti kondisi masyarakat yang meluas dan kompleks, apalagi dalam keadaan jauh dari tertib atau bahkan kacau penuh pertentangan, tidak akan efektif dijadikan masyarakat sejahtera hanya dengan demokrasi omong tanpa konsepsi dan arah pembangunan. Untuk itu pemerintahan yang kuat otoriter bisa jadi lebih menjamin ketertiban dan kemajuan masyarakat. Ternyata mudah berlangsung dialektika perkembangan pemerintahan antara sistem demokrasi dan monarki otoriter dalam sejarah kenegaraan. Dalam bentuk-bentuk negatifnya baik pada negara demokrasi maupun negara monokrasi, pemerintahan diwarnai oleh ulah para penguasa untuk mencari kepentingannya sendiri dan melalaikan kepentingan warga negara yang tidak berkuasa dan tidak bisa bersuara. Apabila orang sudah berkuasa, dia cenderung mau memperkuat kekuasaannya terus-menerus dan tentu saja ingin melimpahkan kekuasaan kepada kaum keluarga dan akhirnya mewariskan kekuasaan kepada keturunannya. Hal inilah yang terjadi mengapa sampai dalam kurun waktu panjang negara-negara berpemerintahan sistem monarki feodal dengan kekuasaan yang absolut.

Jaman Modern

Sistem monarki feodal itu di Eropa Barat dalam Jaman Modern sedikit demi sedikit berhasil dilongsorkan oleh seruan gagasan hak asasi manusia yang mencita-citakan penghargaan akan hak *kebebasan dan kesamaan asasi*

kaya menjadi semakin kaya sebaliknya kaum miskin tetap saja miskin dan bahkan menjadi korban dari mereka yang kaya. Ibaratnya anak domba di-suruh berlaga dengan srigala, tentu saja si anak domba menjadi mangsa yang tak berdaya.

Demikianlah praktek Demokrasi Liberal telah menghasilkan masyarakat Kapitalisme, di mana kaum pemilik modal yaitu si kapitalis pengusaha mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dari penghasil bahan mentah dan dari tenaga buruh yang hanya diberi nafkah sekedar bisa menyambung hidup. Negara-negara kapitalis ternyata sejak abad XVII telah menyebabkan kesengsaraan kaum buruh dan petani di Eropa, dan juga menyengsarakan penduduk-penduduk pribumi di negara jajahannya. Hal ini yang dialami oleh nenek moyang kita di jaman perlawanan Sultan Hasanuddin, Kapiten Pattimura, Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, atau Teuku Umar.

Dominasi sebagian kecil masyarakat makmur atas sebagian besar masyarakat miskin yang sengsara di Eropa mendorong pemikiran Jean Jacques Rousseau (1712-1778) untuk merancang negara *Demokrasi* yang bersifat *Totaliter*. Kehidupan negara harus menjadi "urusan seluruh rakyat" (res publica), maka itu negara harus menjadi *Republik* dan bukan monarki atau oligarki. Urusan negara adalah supaya dapat mengusahakan kepentingan seluruh rakyat, khususnya kepentingan *mayoritas warga negara*. Dalam hal ini kehendak atau kepentingan mayoritas warga negara harus dipandang sebagai kehendak umum yang wajib dilaksanakan oleh negara, kalau perlu dengan mengorbankan kepentingan minoritas warga negara. Gagasan Demokrasi Totaliter ini diwujudkan pada waktu Revolusi Perancis dalam Republik Perancis 1792 di bawah pemerintahan Robbespierre yang secara tanpa kompromi menundukkan kepentingan minoritas kepada kepentingan mayoritas atas dasar semboyan revolusi: *Liberte, Egalite, Fraternite* (kebebasan, kesamaan, persaudaraan).

Namun dalam perkembangan lebih lanjut, bentuk negara Monarki Konstitusional yang bercorak Demokrasi Liberal adalah yang kebanyakan dianut oleh negara-negara Eropa. Penekanan kebebasan yang sebesar-besarnya itu dalam pelaksanaannya menumbuhkan dan menyebarkan sikap bermasyarakat yang individualistis. Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan penemuan teknologi menyebabkan revolusi industri yang makin meningkatkan perkembangan kapitalisme pula. Individualisme dan liberalisme menjiwai ekonomi yang semakin berkembang ini. Akibatnya, terus-menerus berlangsunglah praktek *pemerasan atau penghisapan* keuntungan dari kelompok ekonomi kuat terhadap masyarakat ekonomi lemah dan merajalela kepincangan sosial dalam masyarakat, terlebih-lebih dalam abad XIX. Karena rendahnya tingkat gaji dan menyebarnya kemiskinan masyarakat, maka meluaslah *tenaga buruh wanita dan buruh anak-anak di bawah umur*.

Hak-hak sosial itu berhasil diterima meluas, karena disadari bahwa hak-hak asasi setiap warga negara baru bisa terlaksana secara konkret apabila sudah terjamin kesamaan minimal di antara semua warga. Kesamaan minimal ini mempersyaratkan terpenuhinya kondisi sosial tertentu. Dapat dibayangkan jika karena kemiskinannya orang terpaksa bekerja keras dari pagi sampai malam, pasti sulit untuk melaksanakan hak asasinya dalam bidang politik atau budaya. Juga orang yang buta huruf dan terlalu miskin akan sulit dapat mengajukan tuntutan kepada lembaga kehakiman atau minta nasihat hukum, karena tak tahu apa-apa dan tak mampu membayar. Atas pertimbangan ini diakui bahwa pelaksanaan hak-hak asasi mengandaikan hak-hak sosial untuk mendapat bagian yang adil dari harta benda serta budaya masyarakat secara keseluruhan. Oleh sebab itu diyakini pandangan bahwa *negara wajib mengusahakan* untuk semua warganya syarat kebutuhan hidup pokok minimum, agar mereka dapat mengembangkan hidupnya dengan melaksanakan hak-hak asasinya.

DEMOKRASI PANCASILA MENGEMBANGKAN KESEJAHTERAAN UMUM

Perkembangan pemerintahan berdasarkan demokrasi yang terjadi dalam sejarah umum bangsa-bangsa itu sudah tentu dipelajari oleh para tokoh pejuang kemerdekaan dan pendiri negara Indonesia. Khususnya diketahui bahwa berbagai jenis pelaksanaan demokrasi ternyata belum dapat menjamin terwujudnya kesejahteraan bagi segenap warga negaranya, bahkan sebaliknya ada yang justru menyengsarakan warga negara pada umumnya.

Dari sini dipahami bahwa tidak sembarang jenis demokrasi akan mampu menghantarkan bangsa Indonesia menuju cita-cita yang telah lama didambakannya, yaitu masyarakat yang *adil dan makmur lahiriah-batiniah*. Oleh sebab itu ketika merancang kemerdekaan negara Indonesia, para pemikir Undang-Undang Dasar pada hari-hari sebelum Kemerdekaan 17 Agustus 1945 berdaya-upaya untuk memenuhi cita-cita bangsa Indonesia ini, dengan menyusun negara demokrasi yang disesuaikan dengan aspirasi bangsa yaitu sistem *Demokrasi Pancasila*: demokrasi yang berdasarkan Pancasila.

Para bapak pendiri negara itu sudah memahami bahwa negara demokrasi yang pada hakikatnya merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat itu dalam proses pelaksanaannya yang bercorak *liberal* atau *totaliter* justru hanya menyejahterakan kalangan kaum penguasa politik atau ekonomi dalam melalaikan ataupun tak mau tahu mengenai aspirasi kehidupan rakyat kebanyakan. Demokrasi liberal dalam perwujudannya telah menyebarkan peruncingan persaingan di antara individu menjadi pertarungan dan bukan mengembangkan kerjasama persaudaraan. Sementara itu demo-

adalah lima nilai, kristalisasi budaya Indonesia, sebagai kesatuan ideal-ideal yang utuh dan tak boleh dipisah-pisahkan, di mana masing-masing nilai itu saling melengkapi dan memberi makna.

Itu berarti bahwa Demokrasi Pancasila merupakan pemerintahan berpaham kerakyatan yang pada khususnya terintegrasi dengan paham-paham Ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan, dan keadilan sosial dari Pancasila, sehingga pelaksanaannya dijiwai dan diorientasikan oleh sila-sila tersebut.

Kebebasan dan Kesamaan Derajat Warga Negara

Sesuai dengan ide dasar paham demokrasi, maka Demokrasi Pancasila pun merupakan sistem kemasyarakatan yang mengakui kebebasan dan kesamaan derajat sesama manusia. Namun sistem Demokrasi Pancasila khususnya menginginkan warganya menjadi pribadi-pribadi Indonesia, yang budaya kebebasan dan kesederajatannya hidup dalam semangat *kekeluargaan dan gotongroyongan*. Apalagi semangat ini perlu untuk mempersatukan segenap warga bangsa yang *beraneka-ragam* suku, ras, agama, adat, budaya, dan tingkat hidup atau kecerdasannya menuju suatu keseluruhan dan ketuhanan yang terpadu serta kompak untuk membangun masyarakat adil dan makmur lahiriah-batiniah.

Perilaku sosial bercorak "kekeluargaan" dapat dikatakan ditandai oleh sifat *hubungan pribadi* yang rukun atau guyub dalam semangat *persaudaraan*, sedangkan perilaku sosial bercorak "gotong-royong" ditandai oleh kepentingan *hubungan bekerjasama* yang saling membantu dan saling menunjang tetapi kurang personal. Namun sifat kekeluargaan ini harus dibedakan dari semangat kekeluargaan yang hanya menekankan *hubungan bapak-anak*, yaitu sebagai hubungan antara pihak "yang harus dituruti" dan pihak "yang harus menurut" di mana hal demikian merupakan ketidaksederajatan yang picik serta mau memenangkan satu pihak dan bukan kekeluargaan yang berciri persaudaraan.

Jadi Demokrasi Pancasila menghargai warga-warganya sebagai pribadi-pribadi yang perlu hidup dan berkembang bersama di dalam suasana gotong-royong dan kekeluargaan. Bagaimanapun ini sesuai dengan dalil dasar, bahwa seseorang manusia *hanya dapat mencapai* tujuan hidupnya yaitu berkembang sempurna dan hidup sejahtera, apabila ada "kerjasama" (gotong-royong) dan "cinta-kasih" (kekeluargaan) dari orang-orang lainnya. Kerja keras bersama dan cinta kasih ini diandalkan untuk mengusahakan *kepentingan lahiriah dan batiniah* perorangan, yang pada hakikatnya merupakan makhluk jasmani dan rohani. Sudah pasti orang tidak cukup sejahtera lahir batinnya hanya dengan bekerja saja atau dengan cinta kasih saja, melainkan harus dengan keduanya.

selengkap-lengkapnya adalah secara bersama-sama dengan orang-orang lain yang bervariasi kemampuannya. Dan perkembangan yang sewajarnya ini menuntut keadaan masyarakat yang mengembangkan kesejahteraan umum dan bukan masyarakat kacau-balau, dalam kepincangan, permusuhan, atau peperangan. Bagaimanapun kondisi kesejahteraan umum ini tergantung dari sumbangan *segenap warganya*. Perbuatan-perbuatan bebas masing-masing warga yang baik atau yang buruk akan menentukan dikembangkan atau dirusakkannya kesejahteraan umum itu.

Oleh sebab itu, dalam menjalankan kebebasannya setiap warga masyarakat perlu mempunyai *tanggung jawab sosial* dan menyadarinya sebagai kemungkinan untuk saling membantu dan melengkapi dengan orang lain. Akibatnya, kalau hal ini berlangsung pada masyarakat umum, maka akan mendorong terciptanya kesejahteraan umum. Adanya rasa tanggung jawab sosial ini akan menginsyafkan orang bahwa dirinya di samping memiliki hak-hak asasi juga mempunyai *kewajiban-kewajiban asasi* terhadap sesama warga lain atau masyarakat. Adapun pemenuhan hak-hak asasi perorangan secara umum, sangat tergantung pada pemenuhan kewajiban-kewajiban asasi ini oleh masing-masing warga masyarakat.

Diarahkan oleh Nilai-nilai Luhur Pancasila

Barangkali dirasakan kurang tepat membicarakan negara demokrasi difokuskan pada penekanan kebebasan warga negara. Tetapi perlu dimengerti kebebasan di sini adalah dalam arti kemampuan untuk *aktif* berbuat, yaitu tanpa ada paksaan atau tekanan dari dalam maupun dari luar, sehingga manusia sungguh-sungguh menjadi subyek kegiatannya, subyek kesempurnaan serta kesejahteraannya dan bukan sekedar diberi atau dihalangi. Karena negara demokrasi memberi tempat untuk berperannya setiap warganya dan isi peranan ini ditentukan oleh kebebasannya, maka bagaimanapun perwujudan demokrasi sangat berkepentingan dengan masalah *pengembangan kebebasan manusia*.

Sejak rakyat Indonesia merdeka dan memerintah berdasarkan Demokrasi Pancasila, maka kebebasan rakyat Indonesialah yang harus tampil untuk memperjuangkan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila. Hal ini bertentangan dengan di kala jaman pemerintahan Hindia Belanda di mana bangsa Indonesia menjadi *warga negara pelayan* di negerinya sendiri, sebagai manusia tak bebas harus melayani kepentingan warga negara keturunan Eropa dan keturunan orang Timur asing. Sebagaimana kemerdekaan dan kedaulatan rakyat Indonesia harus direbut dengan perjuangan yang susah-payah, sekarang ini pun kemerdekaan itu harus diisi dengan perjuangan keras untuk mengembangkan kebebasan segenap warga negaranya.

Untuk kebersamaan dan pertumbuhan itu pula nilai "kerakyatan Pancasila" menegaskan prinsip musyawarah maupun perwakilan dalam kehidupan bernegara dan bukan bentuk pemaksaan atau manipulasi. Dengan musyawarah, dialog, atau komunikasi berarti pendapat maupun keinginan para warga ditampung dan dikembangkan mencari kebijaksanaan yaitu kebenaran yang paling baik dan mudah untuk membangun kemajuan dan kesejahteraan bersama. Karena kemampuan setiap warga bervariasi dan tidak sama kualitasnya, maka sistem perwakilan mempercayakan fungsi-fungsi sosial kepada warga-warga yang berkemampuan lebih dalam bidangnya masing-masing, supaya tujuan pembangunan dengan demikian tercapai lebih efektif dan optimal.

Apabila keadilan sosial dilaksanakan dan musyawarah serta perwakilan berlangsung semakin baik, maka nilai persatuan dan cinta bangsa/tanah air dimudahkan perwujudannya. Pada gilirannya kesadaran ini akan meningkatkan usaha setia kawan, musyawarah, dan perwakilan itu. Supaya ikatan persatuan ini bersifat dinamis dan tidak beku, maka Pancasila dengan paham bhinneka tunggal ika senantiasa mengakui keanekaragaman atau perbedaan yang justru bersifat saling melengkapi dan mengembangkan dan bukan perbedaan yang saling dipertentangkan.

Semua usaha pembangunan negara ini tujuannya adalah untuk "kemanusiaan," supaya manusia-manusia warganya senantiasa dijadikan subyek kesejahteraan, kemajuan, atau peradaban. Oleh karena itu, prinsip kemanusiaan selalu mengingatkan agar jangan sampai terjadi satu pun manusia warganya dikorbankan untuk pembangunan. Sistem dan cara boleh sering berganti-ganti, namun demi nilai kemanusiaan semua itu harus berhasil meningkatkan kualitas hidup manusia-manusia warganya, yaitu meluhurkan martabat pribadi manusia, sekaligus meminimalkan risiko (korban) sampai sekecil-kecilnya.

Usaha-usaha pembangunan itu di samping didasarkan pada budi pekerti luhur yang diajarkan Tuhan, juga diarahkan untuk semakin mempersatukan manusia dengan Tuhan. Sesuai dengan yang diyakini budaya asli, maka Tuhan pun dapat dikatakan sebagai "sangkan paraning" atau asal dan tujuan dari budi pekerti luhur kita dalam membangun negara yang bisa memajukan dan menyejahterakan segenap warganya. Bagaimanapun hidup manusia membutuhkan Tuhan. Kalau dambaannya ini tidak terisi oleh *Tuhan yang benar*, niscayalah akan terisi oleh "Tuhan" buaatannya sendiri: entah itu nafsunafsunya, sistem, ajaran, atau pengkultusan lain. Di sinilah peranan agama atau aliran kepercayaan di negara Pancasila untuk mengajarkan Tuhan yang benar, supaya manusia jangan diperbudak atau mempertuhankan nafsu, sistem, ajaran, atau kultus tertentu.

Melaksanakan Demokrasi Pancasila pada dasarnya membuat *berperannya seluruh rakyat* untuk terlibat dalam pembangunan masyarakat Pancasila. Adapun yang berada langsung di tengah-tengah rakyat ini adalah *para pejabat di lapangan*. Sangat tergantung dari mereka inilah khususnya partisipasi masyarakat luas untuk dibangkitkan dan digalakkan. Untuk itu memang setiap pelaksana pembangunan di lapangan dituntut menjamin pelayanan mereka di berbagai bidang, supaya masyarakat umum secepatnya dilepaskan dari belenggu keterbelakangan dan tekanan hidup yang melumpuhkan sumber daya kemanusiaan mereka. Karena baru bila *kemampuan rakyat dihargai dan ditingkatkan*, maka Demokrasi Pancasila dapat berkembang untuk memperjuangkan nilai-nilai Pancasila itu.

Pengembangan kemampuan rakyat itu dalam berbagai bidang: ekonomi, sosial, politik, budaya harus senantiasa digiatkan di tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten, propinsi, dan nasional. Andaikata cita-cita Demokrasi Pancasila sukar mengembangkan kemampuan rakyat di tingkat desa untuk turut berperan mewujudkan nilai-nilai Pancasila, maka itulah merupakan tanggung jawab dari penyelenggara pembangunan tingkat kecamatan. Dan demikian seterusnya sampai tingkat pusat. Tingkat pusat wajib menggiatkan wilayah propinsi untuk terus-menerus menggerakkan dan meningkatkan kemampuan seluruh warganya melibatkan diri berdemokrasi Pancasila, yaitu berperan ikut membangun masyarakat Pancasila. Bila bangsa Indonesia mau bersungguh-sungguh mengembangkan Demokrasi Pancasila, maka penyelenggaraan dan pengawasan dari jenjang pemerintahan teratas sampai terbawah, begitu pula sumbang saran dan koreksi dari masyarakat politik maupun cendekiawan terhadap pelaksanaan demokrasi harus semakin komunikatif. Prinsip komunikasi ini bersifat memusyawarahkan kegiatan segenap warga bangsa, di mana dengan itu diusahakan hikmat kebijaksanaan, persatuan terpadu, solidaritas, dan kebersamaan yang kompak.

Memasuki Pelita IV yang bertujuan sebagai masa peletakan kerangka lepas-landas untuk pembangunan masyarakat Pancasila, maka pelaksanaan demokrasinya pun dituntut untuk bisa menyusun kerangka yang kuat dan mantap. Dalam arti supaya *setiap warga negara dapat menjalankan demokrasi*, dipersyaratkan kondisi umum adanya *kesamaan minimal hidup layak* di antara warga negara dan ini membutuhkan pengarahannya serta penerahan kemampuan nasional untuk mengamalkan keadilan sosial. Untuk itu perlu digerakkan kebersamaan dan solidaritas yang kompak guna menghapuskan tingkat hidup di bawah garis kemiskinan. Dalam Pelita IV bangsa Indonesia andaikata mau, pasti lebih mampu melaksanakan ini, bilamana diingat bahwa pendapatan negara setahun yang sebelum Pelita I masih kurang dari US\$1 milyar memasuki Pelita IV sekarang sudah mencapai lebih dari US\$25 milyar.

Perkembangan masyarakat sering kali menanggung kesenjangan besar an-